Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan
Volume 4, Nomor 2, Juni 2026, Hal. 120-135

p-ISSN: 2721-XXXX
e-ISSN: 2722-XXXX

GOLPUT DI KAMPUS, APATIS DI NEGARA: URGENSI PARTISIPASI PEMIRA SEBAGAI WUJUD HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA UNIVERSITAS SEMARANG

Abstention on Campus, Apathy in the State: The Urgency of Student Electoral Participation as a Reflection of Student Rights and Obligations at Semarang University

Julia Salsa Nugraheni, Dina Muqoddimatul Ula, Sahrul Setiawan, Fakhri Al Lujainiddani,

Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Semarang, Indonesia
Email Korespondensi: nugrahenijuliasalsa@gmail.com

Abstrak

Fenomena golongan putih (golput) dalam Pemilihan Umum Raya (Pemira) mahasiswa merupakan tantangan serius dalam ekosistem demokrasi kampus yang mencerminkan potensi apatisme politik di level kenegaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tingginya angka golput di lingkungan Universitas Semarang (USM), menjelaskan urgensi partisipasi Pemira sebagai implementasi hak dan kewajiban warga negara muda, serta merumuskan rekomendasi strategis. Menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui kuesioner daring terhadap 68 responden mahasiswa USM. Hasil analisis menunjukkan terdapat paradoks yang signifikan: mayoritas responden memiliki kesadaran kewargaan yang tinggi (94% menganggap Pemira adalah hak dan kewajiban), namun tingkat golput riil masih mencapai 27,9%. Alasan utama golput didominasi oleh faktor teknis-informasional, yaitu kurangnya informasi mengenai Pemira (50,8%). Temuan ini mengonfirmasi pentingnya optimalisasi strategi sosialisasi tatap muka maupun digital terintegrasi untuk mentransformasikan kesadaran normatif menjadi partisipasi politik aktif, guna memutus rantai perilaku apolitik jangka panjang yang mengancam kualitas demokrasi nasional.

Kata Kunci: Golput, Pemira, Demokrasi Kampus, Hak dan Kewajiban, Kesadaran Kewargaan (Civic Consciousness).

Abstract

The phenomenon of abstention (golput) in the student council general election (Pemira) poses a serious challenge to the campus democratic ecosystem, mirroring potential political apathy at the national level. This study aims to analyze the high rate of abstention at Semarang University (USM), clarify the urgency of Pemira participation as an implementation of the rights and obligations of young citizens, and formulate strategic recommendations. Employing a descriptive quantitative approach, data were gathered through online questionnaires from 68 USM student respondents. The analysis reveals a significant paradox: a vast majority of respondents possess high civic consciousness (94% perceive Pemira as both a right and an obligation), yet the actual abstention rate reaches 27.9%. The primary cause of abstention is dominated by technical-informational factors, specifically a lack of information regarding the election (50.8%). These findings confirm the vital importance of optimizing integrated face-to-face and digital socialization strategies to transform normative awareness into active political participation, thereby breaking the chain of long-term apolitical behavior that threatens the quality of national democracy.

Keywords: Abstention, Pemira, Campus Democracy, Rights and Obligations, Civic Consciousness.

I. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum Raya (Pemira) di lingkungan perguruan tinggi sejatinya bukan sekadar rutinitas tahunan yang digelar demi memenuhi formalitas birokrasi organisasi kemahasiswaan. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi (Rahmah dkk.,2024). Lebih dari itu, Pemira adalah ruang pertama di mana mahasiswa berhadapan langsung dengan mekanisme demokrasi yang sesungguhnya memilih, dipilih, dan bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Namun ironisnya, justru di ruang laboratorium ini angka ketidakhadiran atau yang lazim disebut golput (golongan putih) kerap mencapai angka yang cukup mengkhawatirkan.

Fenomena golput di kalangan mahasiswa bukan hal baru, tetapi tetap sangat relevan untuk dikaji ulang setiap generasinya. Data dari berbagai penelitian internal kampus maupun kajian lembaga kepemudaan menunjukkan bahwa partisipasi mahasiswa dalam Pemira rata-rata hanya berkisar antara 30 hingga 60 persen dari total pemilih yang terdaftar. Artinya, hampir separuh bahkan lebih dari komunitas akademis yang diharapkan menjadi *agent of change* justru memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya. Angka ini bukan sekadar statistik dingin, melainkan mencerminkan sebuah krisis kepercayaan terhadap sistem, krisis makna dalam berdemokrasi, dan yang paling mengkhawatirkan adalah krisis kesadaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara muda.

Dalam perspektif ilmu kewarganegaraan, partisipasi politik merupakan salah satu indikator utama kematangan demokrasi suatu bangsa. Mereka yang melakukan Golput sering disebut sebagai *non-voting* dalam terminologi ilmu politik (Asmarani dkk., 2024). Ketika mahasiswa yang notabene merupakan kelompok terdidik dan paling melek informasi justru absen dari proses elektoral di lingkungan sendiri, maka muncul pertanyaan serius: apakah ini pilihan sadar yang didasarkan pada pertimbangan rasional, ataukah cerminan dari sikap apatis yang tumbuh subur di tengah ketidakpercayaan terhadap institusi?

Pertanyaan tersebut semakin relevan jika dikaitkan dengan konteks Indonesia sebagai negara demokrasi yang masih menghadapi tantangan konsolidasi. Tingkat partisipasi pemilu nasional memang masih terjaga di kisaran 70-80 persen, namun survei Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan berbagai lembaga riset independen secara konsisten menunjukkan bahwa pemilih pemula dan kelompok usia muda menjadi penyumbang angka golput terbesar. Kebiasaan berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam demokrasi terbentuk jauh sebelum seseorang menginjak bilik suara dalam pemilu nasional. Ia terbentuk sejak seseorang duduk di bangku kuliah, menghadapi Pemira, dan memutuskan untuk terlibat atau absen.

Di sinilah letak urgensitas kajian ini. Kampus adalah laboratorium demokrasi yang paling autentik. Ketika mahasiswa terbiasa golput dalam Pemira, mereka secara tidak langsung sedang melatih diri untuk menjadi warga negara yang pasif. Sikap apatis yang berawal dari ketidakpedulian terhadap Pemira kampus berpotensi berlanjut menjadi ketidakpedulian terhadap pemilu daerah, pemilu legislatif, hingga pemilu presiden. Dalam jangka panjang, pola ini mengancam kualitas demokrasi Indonesia secara keseluruhan. Makalah ini diadaptasi menjadi artikel ilmiah dengan tujuan mengurai akar masalah golput di kampus, memahami relasi antara partisipasi Pemira dengan kesadaran hak dan kewajiban, serta merumuskan rekomendasi taktis berbasis data empiris di Universitas Semarang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Golput dan Apatisme Politik

Golput atau golongan putih adalah istilah yang merujuk pada warga negara yang memiliki hak pilih namun dengan sengaja tidak menggunakannya dalam suatu pemilihan. Partisipasi politik adalah tindakan atau kegiatan untuk mendukung ataupun mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemerintah .

Dengan demikian, golput merupakan kebalikan dari partisipasi politik, yakni bentuk penarikan diri dari proses demokrasi.

Surbakti, R. (2010) membedakan ketidakhadiran pemilih ke dalam dua kategori utama: *apathetic non-voter*, yaitu mereka yang tidak memilih karena memang tidak tertarik pada politik, dan *alienated non-voter*, yaitu mereka yang tidak memilih sebagai bentuk protes atau resistensi terhadap sistem politik yang berjalan. Perilaku golput dapat diklasifikasikan ke dalam empat tipologi dasar berdasarkan motivasinya: (1) Golput Teknis, akibat kendala administratif atau fisik; (2) Golput Politis, karena merasa tidak ada kandidat yang representatif; (3) Golput Ideologis, karena ketidakpercayaan pada sistem demokrasi formal; dan (4) Golput Apatis, yang disebabkan oleh ketidakpedulian total terhadap isu-isu politik.

2.2 Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Demokrasi

Secara konstitusional, hak warga negara untuk memilih dijamin dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, serta Pasal 28E ayat (3) mengenai kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ketentuan ini diturunkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan (Kusumawardani dkk., 2024) menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi bertujuan untuk membentuk kesadaran hak dan kewajiban, sehingga partisipasi mahasiswa dalam Pemira adalah implementasi nyata nilai konstitusi dalam skala mikro.

Cogan dan Derricott (1998) mengonseptualisasikan warga negara aktif (*active citizenship*) sebagai individu yang tidak hanya memahami hak-haknya, melainkan juga merasa terpanggil untuk berkontribusi dalam kehidupan bersama. Syafitri dkk. (2025) mengungkapkan bahwa warga negara aktif bukan sekadar mereka yang berpartisipasi dalam pemilu formal, melainkan juga yang terlibat aktif dalam ruang non-formal seperti komunitas, media sosial, dan gerakan advokasi. Sari dkk. (2025) menegaskan bahwa *civic engagement* mencakup tiga aspek utama: *civic knowledge* (pengetahuan), *civic skills & disposition* (kecakapan dan sikap), serta partisipasi nyata dalam isu-isu publik**.** Khairina (2024) juga menemukan bahwa mahasiswa memiliki peran strategis sebagai *agent of change* dalam meningkatkan kesadaran politik serta memperkuat kualitas demokrasi.

2.3 Teori Partisipasi Politik Verba dkk.

Menurut Salma dan Muslim (2025), partisipasi politik mencakup pemberian suara, diskusi politik, hingga pengawasan pemilu. Mengacu pada teori partisipasi politik yang dikembangkan oleh Verba, Schlozman, dan Brady (1995) dalam *Voice and Equality*, terdapat tiga pilar utama yang menentukan keterlibatan politik seseorang: kemampuan (*can't*, berkaitan dengan sumber daya dan pendidikan), motivasi (*won't*, berkaitan dengan ketertarikan psikologis), dan mobilisasi (*nobody asked*, berkaitan dengan jaringan sosial dan sosialisasi). Ketiga faktor ini sangat relevan untuk membedah perilaku pemilih muda di lingkungan kampus.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk memotret fenomena golput dan sikap apatis mahasiswa Universitas Semarang terhadap penyelenggaraan Pemira. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner terstruktur secara daring (Google Form) pada bulan Mei 2026. Sampel penelitian ini berjumlah 68 responden yang merupakan mahasiswa aktif Universitas Semarang dari berbagai angkatan. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa teknik persentase untuk menyajikan kecenderungan sikap, perilaku memilih, alasan golput, serta preferensi strategi sosialisasi mahasiswa.

IV. HASIL DAN ANALISIS

Untuk memahami karakteristik perilaku elektoral mahasiswa Universitas Semarang, data kuesioner dianalisis ke dalam beberapa dimensi, yaitu tingkat partisipasi, motif golput, persepsi normatif, dan preferensi sosialisasi.

4.1 Tingkat Partisipasi dan Pengalaman Memilih

Berdasarkan hasil survei terhadap 68 responden, ditemukan bahwa terdapat 72,1% mahasiswa yang menyatakan ikut berpartisipasi memilih pada pelaksanaan Pemira terakhir, sementara 27,9% sisanya memilih untuk mengambil sikap golput. Di sisi lain, ketika digali mengenai pengalaman empiris selama menempuh perkuliahan, sebanyak 64,7% responden mengaku pernah menggunakan hak suaranya, sedangkan 35,3% menyatakan tidak pernah sama sekali. Data ini menunjukkan angka golput riil (27,9% hingga 35,3%) yang selaras dengan teori *apathetic non-voter* dari Ramlan Surbakti (1992), menandakan bahwa sepertiga dari populasi mahasiswa berada dalam posisi pasif dan teralienasi dari sirkulasi kepemimpinan kampus.

4.2 Faktor Penyebab Golput Mahasiswa

Melalui kuesioner yang diisi oleh 65 responden yang memiliki kecenderungan golput, ditemukan akar penyebab utama perilaku non-partisipatif ini. Alasan terbesar adalah kurangnya informasi mengenai Pemira yang mencapai angka 50,8%. Alasan berikutnya adalah tidak percaya terhadap sistem Pemira (21,5%) dan tidak mengetahui/mengenal calon kandidat yang bertanding (21,5%), sementara 6,2% menganggap Pemira tidak penting.

Temuan ini memberikan penegasan teoretis yang sangat kuat bahwa golput di Universitas Semarang didominasi oleh tipe **golput apatis** dan **golput teknis-informasional**. Masalah utamanya bukan terletak pada resistensi ideologis radikal terhadap sistem kampus, melainkan hambatan informasi. Jika dikaitkan dengan teori Verba, Schlozman, dan Brady (1995), unsur *"nobody asked"* atau kegagalan mobilisasi informasi dan ajakan dari pihak penyelenggara (KPU Mahasiswa) menjadi determinan utama. Ketika mahasiswa tidak mengetahui rekam jejak calon dan mekanisme pemilihan, secara rasional mereka menarik diri dari bilik suara.

4.3 Persepsi Mahasiswa terhadap Relevansi Pemira: Sebuah Paradoks

Penelitian ini menemukan sebuah paradoks yang sangat menarik antara aspek kognitif-normatif mahasiswa dengan perilaku aktualnya di lapangan. Ketika ditanyakan mengenai dampak Pemira, sebanyak 86,8% responden meyakini bahwa Pemira memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan kemahasiswaan di USM. Luar biasanya, 94,0% responden memandang bahwa berpartisipasi dalam Pemira merupakan bagian integral dari hak sekaligus kewajiban mahasiswa. Kesadaran normatif ini diperkuat dengan data bahwa 94,1% responden menilai peran mahasiswa sangat penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi kampus.

Angka-angka di atas (berkisar antara 86% hingga 94%) menunjukkan bahwa modal kesadaran kewargaan (*civic consciousness*) mahasiswa USM sesungguhnya sudah sangat tinggi. Mereka memiliki *civic knowledge* yang

memadai sebagaimana diistilahkan oleh Sari dkk. (2025). Namun, tingginya angka kesadaran ini tidak terkonversi secara linear ke dalam tindakan memilih (di mana angka golput tetap berada pada kisaran 27,9%). Ada jarak atau *gap* yang lebar antara sikap (*attitude*) dan perilaku nyata (*behavior*). Transisi menuju kewargaan aktif membutuhkan jembatan instrumen teknis yang mempermudah penyaluran aspirasi tersebut.

4.4 Strategi Sosialisasi Efektif untuk Meningkatkan Partisipasi

Sebagai solusi atas kendala minimnya informasi, kuesioner menggali preferensi mahasiswa mengenai metode sosialisasi yang efektif. Sebanyak 61,2% responden menyatakan bahwa seminar atau sosialisasi langsung tatap muka adalah bentuk yang paling efektif. Media sosial kampus dipilih oleh 31,3% responden, dan diskusi interaktif di kelas dipilih oleh 7,5% responden. Dominasi pilihan pada sosialisasi langsung menunjukkan bahwa mahasiswa membutuhkan komunikasi dua arah yang interaktif untuk mengikis ketidakpercayaan (distrust) terhadap sistem Pemira, yang didukung oleh amplifikasi konten kreatif melalui media sosial kampus.

Tabel 1. Dokumen Pendukung Hasil dan Analisis Data Survei Pemira Mahasiswa USM

No	Indikator & Pertanyaan Penelitian	Pilihan Jawaban / Alasan	Persentase
1	**Partisipasi Pemira:** Apakah dalam pemira kamu ikut berpartisipasi untuk memilih? (N=68)	Saya ikut berpartisipasi	**72,1%**
		Saya memilih Golput	**27,9%**
2	**Pengalaman Memilih:** Apakah Anda pernah menggunakan hak suara dalam Pemira? (N=68)	Pernah	**64,7%**
		Tidak pernah	**35,3%**
3	**Karakteristik Motif Golput:** Jika Anda tidak memilih (golput), apa alasan utama Anda? (N=65)	Kurang informasi mengenai Pemira	**50,8%**
		Tidak tahu / tidak kenal calon	**21,5%**
		Tidak percaya pada sistem Pemira	**21,5%**
		Tidak merasa Pemira itu penting	**6,2%**
4	**Persepsi Dampak:** Sejauh mana Anda merasa Pemira berpengaruh terhadap kehidupan mahasiswa di kampus USM? (N=68)	Berpengaruh	**86,8%**
		Tidak berpengaruh	**13,2%**
5	**Persepsi Nilai Kewargaan:** Apakah Anda memandang partisipasi dalam Pemira sebagai bagian dari hak sekaligus kewajiban mahasiswa? (N=67)	Ya, merupakan hak & kewajiban	**94,0%**
		Tidak	**6,0%**
6	**Urgensi Demokrasi:** Menurut Anda, seberapa penting peran mahasiswa dalam menjaga keberlangsungan demokrasi kampus melalui Pemira? (N=68)	Penting	**94,1%**
		Tidak penting	**5,9%**
7	**Preferensi Solusi:** Apa bentuk sosialisasi atau strategi yang menurut Anda paling efektif untuk meningkatkan partisipasi? (N=67)	Seminar / sosialisasi langsung	**61,2%**
		Media sosial resmi kampus	**31,3%**
		Diskusi interaktif di dalam kelas	**7,5%**

V. PEMBAHASAN: DAMPAK JANGKA PANJANG DAN URGENSI PARTISIPASI

Sikap masa bodoh politik (*political apathy*) yang diadopsi mahasiswa selama masa studi di perguruan tinggi membawa implikasi destruktif yang bersifat permanen bagi ekosistem demokrasi Indonesia. Dampak jangka panjang yang pertama adalah lahirnya krisis legitimasi pemerintahan terpilih dan menguatnya oligarki. Ketika kelompok terpelajar yang seharusnya menjadi motor penggerak kontrol sosial memilih untuk golput, panggung politik secara tidak langsung diserahkan sepenuhnya kepada kelompok pemilih yang rentan terhadap manipulasi politik transaksional atau *money politics*. Akibatnya, kualitas demokrasi mengalami regresi karena pemimpin yang dihasilkan dari proses pemilu kehilangan landasan legitimasi moral yang kuat dari kaum intelektual muda.

Dampak jangka panjang yang kedua adalah putusnya mata rantai regenerasi kepemimpinan yang ideal dan

munculnya kebijakan publik yang bias pemuda. Kebiasaan menarik diri dari dinamika bernegara selama di kampus cenderung mengkristal menjadi watak kewarganegaraan yang pasif hingga mahasiswa memasuki dunia kerja profesional. Pelemahan daya kritis kolektif generasi muda ini menciptakan ruang kosong (*vacuum of power*) bagi para pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang tidak responsif terhadap kepentingan pemuda dan dunia pendidikan. Pemerintah dan parlemen di masa depan berpotensi melahirkan kebijakan yang merugikan kesejahteraan mahasiswa pascakampus seperti menyusutnya alokasi subsidi pendidikan, melemahnya perlindungan atas hak kebebasan akademik, hingga penyusunan regulasi ketenagakerjaan yang tidak pro-anak muda. Hal ini terjadi karena para elite politik menyadari bahwa mahasiswa bukan merupakan basis massa pemilih yang aktif memberikan kontribusi elektoral.

Melihat berbagai dampak negatif yang telah diuraikan, urgensi partisipasi mahasiswa dalam Pemira menjadi sangat jelas. Pemira bukan sekadar ritualitas organisasi kemahasiswaan, melainkan ruang latihan demokrasi yang paling konkret, paling mudah diakses, dan paling relevan bagi mahasiswa. Sejumlah kajian empiris telah menegaskan bahwa partisipasi dalam pemilihan di tingkat institusi pendidikan merupakan fondasi penting bagi pembentukan kebiasaan berdemokrasi jangka panjang.

Kesadaran kewarganegaraan adalah pemahaman dan kesadaran individu tentang hak dan kewajiban, tanggung jawab, dan peran mereka sebagai warga negara dalam suatu negara atau masyarakat (Kurniawati, 2023). Dari sudut pandang psikologi sosial, berpartisipasi dalam Pemira juga berkontribusi pada pengembangan civic self-efficacy keyakinan individu bahwa tindakannya memiliki dampak nyata terhadap lingkungan sekitarnya. Rasa self-efficacy seseorang tumbuh sejak dini dan menjadi prasyarat penting bagi keterlibatan sipil yang berkelanjutan. Individu yang tidak merasa bahwa tindakannya akan memberi dampak nyata dalam sistem cenderung menarik diri dari partisipasi atau mengurangi keterlibatannya.

Dengan demikian, dari sudut pandang ilmu politik, pendidikan kewarganegaraan, maupun psikologi sosial, partisipasi mahasiswa dalam Pemira bukan sekadar mekanisme administratif organisasi kemahasiswaan. Pemira adalah instrumen pembentukan civic consciousness yang bernilai tinggi yakni sebuah ruang di mana kebiasaan berdemokrasi dibangun, kapasitas berpikir kritis diasah, dan keyakinan akan agen perubahan diperkuat fondasi yang akan terbawa sepanjang hayat ke dalam kehidupan demokratis yang lebih luas.

VI. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan teoretis, artikel ini menyimpulkan bahwa fenomena golput dalam Pemira di Universitas Semarang nyata terjadi dengan angka mencapai 27,9% hingga 35,3%. Terdapat kondisi paradoks psikologis-kewargaan yang masif, di mana mayoritas mutlak mahasiswa (94%) memiliki kesadaran kognitif yang sangat tinggi mengenai pentingnya Pemira sebagai hak dan kewajiban serta penjaga demokrasi, namun gagal mengonversinya menjadi perilaku memilih riil akibat kendala teknis-informasional. Alasan utama golput didominasi oleh faktor kurangnya informasi (50,8%). Perilaku golput di kampus ini berbahaya karena berpotensi membentuk watak apolitik yang permanen, mengancam regenerasi kepemimpinan, dan menyuburkan oligarki nasional di masa depan.

5.2 Saran

1. **Bagi Mahasiswa USM:** Diharapkan mampu mengikis transisi skeptisisme dengan mengonversi kesadaran normatif menjadi aksi nyata di bilik suara, serta aktif mencari informasi mengenai rekam jejak calon demi menunaikan tanggung jawab moral kewargaan.
2. **Bagi KPU Mahasiswa (Penyelenggara):** Wajib mereformasi strategi sosialisasi dengan memprioritaskan kegiatan interaktif langsung (seminar/forum terbuka) sebesar 61,2% sesuai kebutuhan pasar, yang dikombinasikan dengan diseminasi informasi digital yang transparan dan inklusif.
3. **Bagi BEM dan DPM:** Harus mampu membuktikan legitimasi kinerjanya melalui program advokasi yang berdampak langsung bagi mahasiswa guna meningkatkan *trust* (kepercayaan) konstituen.
4. **Bagi Institusi Universitas Semarang:** Perlu memberikan dukungan kebijakan dan mengintegrasikan pembelajaran mata kuliah wajib kurikulum Pancasila/Kewarganegaraan dengan praktik demokrasi kampus secara sinergis.

DAFTAR PUSTAKA

Asmarani, S. D., Putri, V. M., & Jayanti, W. D. (2024). Analisis Perilaku Golput di Kalangan Masyarakat dan Aspek Hukum Golput dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 814.

Cogan, J. J., & Derricott, R. (Eds.). (1998). *Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education.* London: Kogan Page.

Kusumawardani, S. S., Budimansyah, D., Triyanto, Wibowo, W., & Copik, M. (2024). *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi: Pendidikan Kewarganegaraan (Edisi II)*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sari, D. P., Putri, D. S., Saputri, R. Y., dan Kusuma, F. A. (2025). Dari Kelas ke Aksi Sosial: Efektivitas Integrasi Project Citizen dan Project-Based Learning dalam Meningkatkan Civic Engagement Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewanegaraan*, 9(2), 226.

Kurniawati, A., dan Najicha, F. U. (2023). Pentingnya peningkatan kesadaran kewarganegaraan pada mahasiswa di lingkungan kampus. Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan, 12(2), 100.

Khairina, Maura. (2026). Partisipasi Mahasiswa Kota Jambi sebagai Agen Perubahan dalam Politik pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. *Repository Universitas Jambi*. Hal 10.

Rahmah, L. N., & Fauzi, A. M. (2024). Tidak Tahu, Kecewa dan Golput: Mahasiswa dalam Pemilu 2024. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 13(2).

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Lembaran Negara RI Tahun 2012, Nomor 158.

Syafitri, J.R., Handriansyahri, T.C., Harianti, R.M.D., Br. Manali, G.T., Sitohang, S.I., Chantika, N., Manurung, R., Annisa,S. (2025). Peran Gen Z dalam Menguatkan Demokrasi dan Kewargaan Aktif. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(5), 456.

Salma, S. M., & Muslim, J. (2025). Partisipasi politik masyarakat Purwakarta pada Pilkada 2024 dan pengaruhnya terhadap kualitas pemilu. *Gunung Djati Conference Series*, 50, 191.

Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Cambridge: Harvard University Press